



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 072/I/KPTS-K/2023

TENTANG
PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah penyelenggaraan Bimbingan Teknis;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STPMD "APMD".

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0149/O/1989, tanggal 16 Maret 1989, tentang Perubahan Bentuk Dan Nama Akademi Administrasi Pembangunan "APMD" Di Yogyakarta Menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 794/SK/BAN-PT/AK-PPJ/PT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Kota Yogyakarta;
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Nomor: 347/Kpts/YPP-17/Y/VIII/2022 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta;
6. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Nomor: 09/PK/2022 tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Tahun 2022-2027;
7. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Nomor: 001/KPTS-K/2012, tentang Kebijakan Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal STPMD "APMD" Yogyakarta;
8. Surat Keputusan Ketua STPMD "APMD" Nomor : 063-A/I/KPTS-K/2013 Tentang Pembentukan Pusat Studi Kebijakan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat STPMD "APMD" Yogyakarta

Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala PSKPPM STPMD "APMD" Nomor : 039/PSKPPM/B/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023, Hal : Permohonan Surat Keputusan;
2. Surat dari Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul, Nomor : 000.9.4/118, tanggal 5 Juni 2023, Perihal : Surat Penunjukkan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD;
3. Hasil rapat Pimpinan STPMD "APMD" pada tanggal 5 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TENTANG PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kesatu : Menetapkan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat STPMD "APMD" dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum "Kesatu" dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2023, bertempat di Hotel Santika-Gunungkidul, Jl. Yogya-Wonosari KM. 3,5 Gunungkidul;

Ketiga : Segala bentuk pembiayaan akibat penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas ditanggung sepenuhnya oleh panitia sebagaimana tersebut pada diktum "Kesatu";

Keempat : Setelah selesai kegiatan Panitia berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada Ketua STPMD "APMD";

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya keseluruhan kegiatan Bimbingan Teknis;

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta
tanggal : 5 Juni 2023

Ketua
[Signature]
Dr. Sigit Eko Yunanto
170 230 190

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAN BIMBINGAN TEKNIS
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Ketua : Kepala PSKPPM
Dr. Supardal, M.Si.
2. Sekretaris : Sekretaris PSKPPM
Drs. RY Gatot Raditya, M.Si.
3. Koord. Lapangan : R.Y. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.
4. Sekretariat : Teddy Kurniawan, S.Kom.
5. Bendahara : Wiji Astuti, A.Md.

Yogyakarta, 5 Juni 2023

Ketua Penanggung jawab



Dr. Porro Eko Yunanto

NIY 170 230 190



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email pskppm@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

044.a/PSKPPM/B/VI/2023

Dengan hormat, berdasarkan surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Nomor 000.9.4/118, tertanggal 5 Juni 2023, Perihal Surat Penunjukan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD, maka dengan ini Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Supardal, M.Si.
NIY/NIDN : 170 230 191/ 0505106602
Program Studi : Ilmu Pemerintahan, Program Magister

sebagai Narasumber pada kegiatan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juni 2023
Nama Kegiatan : Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Materi : *“Komunikasi Politik Konteks Pemilu 2024”*
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tempat : Hotel Santika - Gunungkidul
Jl. Jogja – Wonosari KM. 3,5 Gunungkidul

Demikian Surat Tugas ini diberikan, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



19 Juni 2023
a.n Kepala
Sekretaris PSKPPM

Dr. RY. Gatot Raditya, M.Si.
NIY. 170 230 166

KOMUNIKASI POLITIK KONTEKS PEMILU 2024

Dr. H. Supardal, M.Si

Kepala PSKPPM/ Dosen Magister Ilmu Pemerintahan STPMD

HP: 085729216279/Email : gusdal66@gmail.com

Pada Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Gunungkidul

Tanggal 22 Juni 2023 di hotel Ininside Yogyakarta

APA ITU KOMUNIKASI POLITIK?

- Komunikasi Politik adalah komunikasi yang **melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.**
- Komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam demokratisasi. Dengan adanya persaingan kepentingan komunikator politik **untuk memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.**
- Secara garis besar, proses komunikasi politik tidak berbeda jauh dengan komunikasi pada umumnya. Karena melibatkan **komunikator, komunikan, pesan, media, dan pengaruh atau efek**

MENGELOLA KOMUNIKASI POLITIK

- Salah satu faktor menentukan bagi seluruh kekuatan yang akan berkompetisi adalah **mengoptimalkan komunikasi** guna menguatkan sinergi, memperbesar peluang raih dukungan, menjembatani ragam perbedaan, dan mengontrol berbagi potensi kerusakan.
- Komunikasi politik memiliki peran signifikan. Panggung politik elektoral kita saat ini semakin **termediasi oleh begitu banyaknya media**, baik media konvensional maupun media baru.
- Keberlimpahan informasi memapar khalayak dalam waktu singkat, mudah tersebar luas melintasi strata ekonomi, pendidikan, daerah, bahkan usia. **Ragam pernyataan elite politik**, mudah sekali diproduksi, direproduksi, didistribusikan hingga dikonsumsi oleh khalayak.

Intensitas komunikasi

- Dari sisi komunikasi politik, ada catatan penting untuk mengawali tahapan pemilu 2024, yakni **meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi berbasis komunitas**.
- Partai politik maupun calon legislative harus **intens mengelola kerja nyata di masyarakat**. Pencitraan searah saja tak cukup mengerek naiknya tingkat penerimaan, tingkat keterkenalan dan tingkat keterpilihan mereka.
- Intensitas komunikasi melalui **ragam inisiatif kerja nyata menjadi prioritas utama**. Terbukti selama ini, masifnya baliho pencitraan dengan beragam narasinya tidaklah efektif mendongkrak tingkat keterpilihan baik parpol maupun sosok calon wakil rakyat.
- Baliho **mungkin bisa menaikkan keterkenalan**, tetapi di saat bersamaan tingkat kesukaan ataupun penerimaan warga pada parpol ataupun sosok bisa turun, terlebih jika baliho-baliho yang terpasang banyak mengganggu ketertiban umum, estetika kota atau melanggar etika karena memanfaatkan situasi masyarakat yang sedang berduka.

Pendekatan ...

- Pendekatan basis komunitas tersebut adalah **pelayanan** komunitas (*community services*), **pemberdayaan** komunitas (*community empowerment*) dan **hubungan komunitas** (*community relations*).
- **Kerja nyata mengurai masalah yang ada di masyarakat**, jika dikelola dengan komunikasi yang baik, akan menguatkan pelibatan publik internal maupun eksternal terhadap parpol atau sosok politisi bersangkutan.
- Satu hal yang mesti dikritik, saat ini pemilu kita teramat sangat ditentukan oleh **rezim popularitas yang menggerus gagasan, program, serta kerja nyata para kandidat**.
- Kehadiran para **politisi melakukan pelayanan dan pemberdayaan di masyarakat**, jika dikelola dengan baik akan membuat keberadaan mereka lebih kuat dan mengakar.

Komunikasi baru

- Politik modern juga menuntut para aktor politik memiliki kemampuan reflektivitas organisasi. Ada catatan menarik dari Poole, Seibold, dan McPhee dalam Hirokawa, RY & M.S Poole di bukunya *Communication and Group Decision Making* (1986), **refleksivitas** pada dasarnya merujuk pada kemampuan aktor untuk mengevaluasi tindakan-tindakan dan perilaku mereka.
- **Pengalaman seseorang atau sekelompok orang di masa lalu**, menjadi hal penting untuk memperbaiki situasi dan kondisi saat ini dan juga pengelolaan organisasi di masa mendatang.
- Harus ada **cara dan pendekatan komunikasi baru yang memahami tren di masyarakat**. Kegagapan dan jarak komunikasi yang lebar, menyebabkan tergerusnya peluang mereka di Pemilu 2024.

Protokol dlm komunikasi

- Perilaku pemilih yang banyak berubah mengharuskan strategi komunikasi yang lebih adaptif, oleh karenanya **perlu protokol komunikasi yang relevan** dengan perkembangan politik saat ini dan ke depan.
- Protokol komunikasi penting dimiliki, agar pengelolaan **komunikasi lebih terukur, tepat guna dan tepat sasaran.**
- Minimal ada 12 standar penting dalam protokol komunikasi yakni.
- **konteks komunikasi, tujuan, rujukan, narasi utama, peran informasi, kegiatan komunikasi, para pihak yang terlibat, kanal yang digunakan, khalayak sasaran, efek yang diharapkan, serta panduan yang boleh dan tak boleh dilakukan/disampaikan**

Perhatian....

- Catatan penting lainnya adalah **mengelola opini dan diskursus publik**. **Partai maupun caleg tidak berada di ruang hampa**, melainkan berinteraksi dengan publik, oleh karenanya diperlukan pengelolaan opini publik, manajemen isu, manajemen konflik serta komunikasi krisis yang dapat merusak sentimen positif parpol dan politisi dalam persepsi khalayak.
- Para politisi dituntut piawai mengelola pernyataan mereka di muka publik melalui **manajemen privasi komunikasi** yang lebih terkendali.
- Mengacu ke bukunya Sandra Petronio, *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure* (2002), manajemen privasi komunikasi adalah **mengelola pertimbangan dan pilihan** mengenai apa yang harus dikatakan, dan apa yang harus disimpan dari publik.
- Politisi **mempertimbangkan dan mengatur pesan** yang diproduksi serta dibagi ke khalayak luas berdasarkan kriteria penting tidaknya pesan tersebut

Contoh yg hrs dihindari?

- Kita bisa belajar pentingnya manajemen privasi komunikasi dari kasus yang menimpa **Arteria Dahlan (politisi PDI Perjuangan) dengan warga suku Sunda dan Edy Mulyadi (wartawan/mantan caleg PKS)** dengan warga Kalimantan. Keduanya bermasalah karena pernyataan mereka yang dianggap menyinggung suku dan daerah.
- Satu hal yang diabaikan saat para politisi itu mengeluarkan pernyataan, bahwa ucapan mereka provokatif, menyulut emosi, dan memantik perilaku kolektif yang resisten terhadap mereka.

Dampaknya.....?

- Dampak pernyataan mereka tidak semata sosiologis dan budaya, melainkan juga **dapat berimplikasi politis**. Pernyataan Arteria Dahlan, misalnya, selain menyinggung kebanggaan warga Sunda, juga berpotensi punya **dampak elektoral bagi PDI Perjuangan** (PDI-P) di Jawa Barat, akibat politik asosiatif antara dirinya dengan partai tempat dia bernaung.
- Meskipun pernyataan itu bersifat personal, tetapi posisinya sebagai politisi PDI-P menjadi tak terpisahkan dalam persepsi sebagian publik Jawa Barat.
- Secara faktual Jawa Barat adalah lumbung suara paling potensial di Indonesia. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Barat pada Pemilu 2019 itu berjumlah 33.276.905, nomor satu terbanyak di atas Jawa Timur (31.011.960) dan Jawa Tengah (27.896.902).

Pesan untuk politisi

- Tren pemilih yang terus berubah menjadi pesan nyata tidak ada **garansi kemenangan** tetap di suatu wilayah. Konteks situasi turut memengaruhi naik turunnya perolehan suara. Jika cara berkomunikasi dalam menangani kerusakan (*damage control*) yang ditimbulkan oleh pernyataan politisi tidak pas atau bahkan menambah masalah, bukan mustahil akan merugikan calon.
- Pernyataan yang tidak **memiliki sensitivitas retorik atau kepekaan komunikasi**, dengan diksi dan agresivitas verbal yang tidak pantas mengemuka saat dirinya mengomentari fenomena tertentu.
- Kritik fokus pada hal-hal substantif seperti **anggaran, kesiapan infrastruktur, keamanan, dampak lingkungan** dan lain-lain. Dan jangan menyinggung perasaan suatu komunitas.

Saran untuk Politisi

- Para politisi sebaiknya memahami bahwa salah satu prinsip komunikasi itu merujuk ke Larry A Samovar dan Richard E Porter dalam bukunya *Communication Between Cultures* (2012), bahwa komunikasi **bersifat irreversible**.
- Artinya, komunikasi tak dapat ditarik kembali, jika seseorang sudah mengatakannya.
- **Pernyataan yang melukai perasaan banyak orang, mungkin saja dimaafkan tetapi tidak mungkin dilupakan.**
- Para **politisi perlu berhati-hati dan mawas diri dalam berkomunikasi.**

Jadi...?

- Pada tahap pemunculan siapapun boleh memiliki keinginan tampil sebagai caleg mendatang, tetapi akan sangat **dipengaruhi oleh kualitas interaksi mereka dengan dua kekuatan utama**, yakni publik yang akan menjadi pemilih dan partai politik yang akan mengusungnya.
- Di tahap pemunculan inilah **komunikasi politik akan sangat menentukan, apakah sosok yang berkeinginan maju di caleg 2024** ini mendapatkan legitimasi dengan meningkatnya dukungan publik secara meluas pada calon atau tidak.
- Meningkatnya **keterkenalan, penerimaan dan keterpilihan** secara signifikan bisa memberi prospek pada pertimbangan partai atau caleg.

Tahap menentukan....

- Tahap pemilihan menjadi penentu, karena pada akhirnya mandat kekuasaan adalah milik rakyat Indonesia yang akan diberikan pada 14 Februari 2024.
- Ada dua faktor utama yang menentukan di tahap pemunculan hingga ke nominasi :
- Pertama, **tidak ada faktor merusak yang mematikan peluangnya**. Seperti kasus hukum yang membelit dirinya terutama di jabatan-jabatan publik yang saat ini diemban caleg.
- Kedua, **strategi komunikasi dalam memengaruhi lingkungan politik untuk memperkuat posisinya** sebagai kandidat paling potensial di tengah kompetitifnya persaingan perebutan tiket dalam pencalegan.
- **Komunikasi politik menjadi kunci**, apakah para kontestan tumbuh menguat atau layu dan mati.

Konteks pemilih 2024

- Anak-anak muda, utamanya generasi milenial menjadi salah satu faktor penentu Pemilu 2024.
- Alasannya. **Pertama**, dari aspek kuantitas, jumlah anak muda ini lebih banyak. Sebanyak 60 persen pemilih itu dari generasi ini.
- **Kedua**, narasi yang muncul itu bisa dibilang banyak dilempar generasi ini baik narasi pemilihan terhadap lingkungan, mental health dan isu-isu kebijakan yang selama ini terluput seperti soal disabilitas, bahkan isu sepak bola.
- Mungkin selama ini isu sepak bola menjadi fanatik-fanatik gitu aja, tetapi generasi ini bakal menjadi pembeda nantinya.
- Karena generasi ini saat ada keluh kesah langsung larinya ke medsos. Ini menjadi peran penentu di pemilu," bebernya.

Next...

- Terkait dengan pentas politik yang tampak saling jegal di tengah jalan, elite yg intervensi calon untuk 2024 menjadi salah satu poin yang direspons generasi M.
- Respons mereka ini mungkin tidak sampai ke aksi golput, tetapi dalam bentuk kritik terbuka dan mengulas itu di berbagai platform media sosial. "Kalau masalah golput, saya kira itu generasi milenial gak sampai itu.
- Soal parpol tidak memiliki kaderisasi yang baik, lebih mementingkan popularitas dan elektabilitas ketimbang kualitas.
- Soal banyak perilaku politik yang dipertontonkan dan itu tidak pantas di mata generasi yang langsung mereka respons dan viral di medsos
- Soal perselingkuhan dan perceraian pun menjadi bagian dari isu yang dilempar dan direspons serius generasi ini.

Perlu diingat...?

- Sesungguhnya tanpa kita sadari, melalui **berbagai media, baik media konvensional maupun media baru seperti media sosial, kita telah menjadi penerima bahkan penikmat informasi politik**, khususnya kandidasi caleg.
- Saking banyaknya informasi yang masuk dari bermacam media tersebut, terkadang masyarakat tidak lagi mampu membedakan **mana informasi yang benar dan mana informasi yang mengandung hoaks**.

Perlu media baru

- **media baru akan semakin berpengaruh terhadap perpolitikan** di Indonesia. Hal ini terlihat dari data pengguna media baru yang kian bertambah dari masa ke masa. “Apalagi pengguna internet di Indonesia semakin meningkat,”
- media konvensional seperti berita televisi masih memiliki peran yang cukup signifikan dalam memengaruhi calon pemilih.
- **media baru sangat efektif untuk meningkatkan popularitas bagi tokoh dan partai politik.** “Seringkali topik-topik yang dibahas di twitter, tiktok, dan media sosial lainnya kemudian diangkat jadi pemberitaan di media konvensional. Ini bukti bahwa media baru dapat memengaruhi media konvensional,”

Walau demikian,.....

- **media baru tidak bisa jadi tulang punggung utama bagi tokoh dan partai politik.** Hal tersebut lantaran pada beberapa tokoh dan partai politik tingkat elektabilitas yang diperoleh tidak berbanding lurus dengan popularitas di media sosial.
- **Tidak perlu kita memilih antara media baru atau media konvensional.** Keduanya sama-sama perlu dimanfaatkan secara maksimal sesuai karakteristiknya masing-masing.
- **pentingnya literasi digital pada era masa kini** guna menyaring informasi dari kedua media tersebut.
- **Bijaklah dalam menggunakan media komunikasi** dalam bentuk apapun

PENUTUP

- BAGI POLITISI KOMUNIKASI POLITIK ADALAH KENISCAYAAN
- KOMUNIKASI POLITIK BAK PISAU TAJAM DUA MUKA?
- KOMUNIKASI POLITIK BUKANLAH SATU-SATUNYA FAKTOR SUKSES DALAM KONTESTASI POLITIK
- FAKTOR TRUST DAN KAPASITAS DLM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT SANGAT PENTING
- MODAL SOSIAL YG DIMILIKI POLITISI AKAN MEMPENGARUHI TINGKAT ELEKTABILITAS CALON
- SELAMAT BERKONTESTASI POLITIK, SEMOGA SUKSES SEEALU!



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email pskppm@apmd.ac.id

SURAT KETERANGAN

046.a/PSKPPM/B/VI/2023

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dengan ini menerangkan bahwa:



Nama : Dr. Supardal, M.Si.
NIY/NIDN : 170 230 191/ 0505106602
Program Studi : Ilmu Pemerintahan, Program Magister

telah melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juni 2023
Nama Kegiatan : Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Materi : “*Komunikasi Politik Konteks Pemilu 2024*”
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tempat : Hotel Santika - Gunungkidul
Jl. Jogja – Wonosari KM. 3,5 Gunungkidul

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juni 2023
a.n Kepala
Sekretaris PSKPPM



Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.
NIY. 170 230 166